

**ANALISIS PERAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO HULU**
(*Analysis of stakeholders role in Bengawan Solo Upstreams Watershed Management*)

C. Yudi Lastiantoro dan S. Andy Cahyono
Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS, Jl. A. Yani, PO Box 295,
Pabelan, Kartasura, PO Box 295 Surakarta, Indonesia
e-mail: bpk_solo_pp@yahoo.com; lastiantoro@yahoo.co.id; sandycahyono@yahoo.com

ABSTRACT

Public participation increasingly required in resources management decision-making. Necessary understanding of who affected by decisions, and who had the power to influence and interest to decision. The purpose of this study was to analyze the role of the parties in the management of the Upper Bengawan Solo Watershed. The study was conducted in the Upper Bengawan Solo Watershed which located in Wonogiri District using qualitative approach and stakeholder analysis methods. The results indicated that there were number of stakeholders who had a major interest and influence in the success of watershed management. Duties and functions determined the degree of influence and interests of the institution. This implies that policy makers in watershed management should take into account their aspirations in achieving successful of Upper Solo watershed management. Coordination is necessary in order to avoid overlap, duplication, and achievement of goals.

Keywords: stakeholder analysis, stakeholders, watershed management role

ABSTRACT

Difference of interest, disagreement and partial management among stakeholders cause watershed management ineffective. This study aims to analyze the role of stakeholders in Bengawan Solo upstream watershed management, Wonogiri district. This research using qualitative method and stakeholder analysis. The results indicated that there were several stakeholders who had major interest and influence on the successful of watershed management. Their primary task and function determine the degree of influence and interests of the institution. Department of Agriculture, Plantation and Forestry District Office were the most influential and interested institutions. This implies that stakeholders should consider their inspiration and coordination.

Keywords: Bengawan Solo watershed, partial management, stakeholders, stakeholder analysis.

ABSTRAK

Partisipasi publik semakin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya. Diperlukan pemahaman siapa yang dipengaruhi pengambil keputusan, siapa yang memengaruhi dan berkepentingan pada keputusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran para pihak dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo bagian hulu. Penelitian ini dilakukan di DAS Bengawan Solo Hulu yang terletak di Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan analisis stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis peran para pihak diketahui bahwa terdapat sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh besar dalam keberhasilan pengelolaan DAS. Tugas pokok dan fungsi menentukan besarnya pengaruh dan kepentingan institusi. Hal ini berimplikasi bahwa para pengambil kebijakan dalam pengelolaan DAS harus mempertimbangkan aspirasi mereka dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi, dan tercapainya tujuan.

Kata Kunci: analisis stakeholder, para pihak, peran pengelolaan DAS

ABSTRAK

Perbedaan kepentingan, ketidakterpaduan, pengelolaan parsial membuat pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) oleh para pihak tidak efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran para pihak dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan analisis stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sejumlah pihak yang berkepentingan dan berpengaruh besar dalam keberhasilan pengelolaan DAS. Besarnya pengaruh dan kepentingan para pihak tergantung pada tugas pokok dan fungsinya. Institusi yang paling berpengaruh dan berkepentingan besar adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten. Implikasi penelitian ini membuat pengambil kebijakan harus mempertimbangkan aspirasi para pihak dan koordinasi.

Kata kunci: para pihak, peran, pengelolaan DAS, parsial, koordinasi

I. PENDAHULUAN

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di banyak tempat di Indonesia saat ini perlu segera ditangani, mengingat daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin terlampaui dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, berkurangnya areal hutan dan kawasan resapan air, semakin meluasnya lahan kritis dan pengembangan wilayah yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan bencana banjir, longsor dan kekeringan (Nugroho, 2015). Pada tahun 2010 saja di berbagai wilayah Indonesia telah terdapat 22 DAS prioritas dari 120 DAS yang masuk kategori kritis untuk segera ditangani (Rosalina, 2010). Beberapa DAS di Jawa yang termasuk prioritas antara lain DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cisadane, dan DAS Bengawan Solo. Kerusakan DAS disebabkan antara lain tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, belum optimalnya peran para pihak dalam mengelola DAS, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Menurut Nugroho (2015), kunci keberhasilan pengelolaan DAS adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dan merasakan manfaat langsung dengan adanya pengelolaan DAS. Diakui bahwa partisipasi publik dan peran para pihak semakin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya (Reed *et al.*, 2009). Pengelolaan DAS pada prakteknya seringkali mengalami konflik kepentingan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya yang lebih berorientasi pada kepentingan sektoral dan perbedaan persepsi para pihak (Alviya *et al.*, 2012; Blackstock *et al.*, 2012). Tarlock (2003) menyebut ketiadaan koordinasi dan kerja sama antar pemerintahan, konflik antar sektor/kegiatan merupakan permasalahan tidak efektifnya dalam pengelolaan DAS. Oleh karena itu, dalam pengelolaan DAS koordinasi dan peran yang dilakukan oleh setiap sektor atau para pihak dalam pengelolaan menjadi penting.

Bengawan Solo Hulu merupakan salah satu DAS yang kritis di Pulau Jawa. Berbagai pihak mencoba mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya dalam DAS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing institusi/lembaga baik Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan. Banyaknya institusi dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu seringkali menimbulkan permasalahan berkaitan dengan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Diperlukan pemahaman siapa yang dipengaruhi pengambil keputusan, siapa yang memengaruhi dan berkepentingan pada pengambilan keputusan dalam suatu DAS. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran para pihak dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu, sehingga dapat diambil kebijakan yang lebih tepat dalam memberikan gambaran nyata di lapangan siapa yang berperan penting dan berpengaruh dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

DAS Bengawan Solo Hulu meliputi enam Sub DAS, yaitu: Sub-DAS Wuryantoro (7.333 ha), Sub-DAS Alang Unggahan (23.728 ha), Sub DAS Solo Hulu (19.976 ha), Sub DAS Temon (6.753 ha), Sub DAS Wiroko (20.580 ha), dan Sub DAS Keduang (42.644 ha). Luas seluruh DAS Bengawan Solo Hulu mencapai 121.014 Ha atau 6,22% luas DAS Bengawan Solo (1.944.344 Ha), dan semuanya bermuara di Waduk Gajah Mungkur (Departemen Kehutanan, 2009).

B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data.

Parapihak (*stakeholder*) adalah setiap individu, kelompok, organisasi atau institusi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh individu, kelompok, organisasi atau institusi (Mitroff dan Linstone, 1993; Colfer *et al.*, 1999; Brinkerhorff dan Crosby, 2002; Puspitojati *et al.*, 2012). Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara mendalam (*deep interview*). Responden ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*). Responden adalah para pejabat di semua institusi/lembaga yang berperan dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. Jumlah responden sebanyak 30 pejabat.

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh tingkat kepentingan dan pengaruh dari parapihak tersebut. Selanjutnya, tingkat kepentingan dan pengaruh tersebut ditampilkan dalam matriks kepentingan dan pengaruh parapihak dalam pengelolaan DAS (Bryson, 2003).

Nilai peubah kepentingan dan pengaruh dari parapihak diperoleh dari hasil total nilai pembobotan pada setiap indikator peubah. Jawaban atas pertanyaan terbuka dari parapihak terhadap indikator kepentingan dan pengaruh yang diperoleh kemudian di skoring berdasarkan pada Skala Likert. Pembobotan Skala Likert yang dipergunakan yaitu nilai 1 (sangat lemah), 2 (lemah), 3 (sedang), 4 (kuat) dan 5 (sangat kuat) baik pada aspek kepentingan maupun pengaruh.

Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Meinen-Dick *et al.* (2004) menyebut analisis data secara kualitatif berguna untuk mengawali kajian tentang aksi kolektif dan para pihak kunci tidak dipahami. Analisis ini juga lebih fleksibel bagi peneliti dan pengambil kebijakan dalam menentukan peubah yang dianggap berpengaruh.

Hasil identifikasi parapihak dalam pengelolaan DAS selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu (Reed *et. al.*, 2009): (1) *Key Players* : memiliki *interest* (kepentingan) dan *influence* (pengaruh/wewenang) yang tinggi, (2) *Context Setters* : memiliki *influence* (pengaruh/wewenang) yang tinggi tetapi *interest* (kepentingannya) rendah, (3) *Subjects* memiliki *interest* (kepentingan) yang tinggi tetapi *influence* (pengaruh/wewenang) rendah, dan (4) *Crowd* : memiliki *interest* (kepentingan) dan *influence* (pengaruh/wewenang) yang rendah. Hasil klasifikasi tersebut selanjutnya ditampilkan dalam bentuk diagram yang menunjukkan kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu.

Cara mengidentifikasi *Key Player*, *Context Setters*, *subjects* dan *Crowd* dengan wawancara kepada para kepala SKPD, kepala suatu unit kerja, ketua lembaga swadaya masyarakat maupun ketua kelompok masyarakat yang peduli pengelolaan DAS. Metode menentukan suatu institusi itu masuk *Key Player*, *Context Setters*, *Subjects* dan *Crowd* dengan diskusi antar para pihak (Grimble, 1998), baik dari SKPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun kelompok-kelompok yang terkait pengelolaan DAS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi dan Peran Parapihak dalam Pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu

Peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu terdiri dari beberapa SKPD/lembaga/kelompok masyarakat, yang mempunyai fungsi dan tugas pokok yang berbeda tetapi saling melengkapi. Hasil inventarisasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing institusi terhadap peran parapihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Fungsi lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam pengelolaan DAS
Table 1. Functions of government and community institutions in watershed management

No. (No)	Nama Lembaga (Institutions name)	Fungsi Lembaga dalam pengelolaan DAS (Institutions function in watershed management)		
		Perencanaan (Planning)	Pelaksanaan (Implementation)	Monitoring dan evaluasi (Monitoring and evaluation)
1	Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	X	-	X
2	Kantor Lingkungan Hidup	X	X	X
3	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	X	X	X
4	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	X	X	X
5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	X	X	X
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat			
7	Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral	X	X	X
8	Dinas Pekerja Umum	X	X	X
9	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo	X	-	X
10	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	X	-	X
11	Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah	X	X	X
12	Perum Jasa Tirta (PDAM)	-	X	-
13	Perusahaan Listrik Negara	-	X	-
14	Lembaga Swadaya Masyarakat	-	X	X

Sumber: Analisis Data, 2011

Source: Data analysis. 2011

Tabel diatas menunjukkan tugas pokok dan fungsi dari institusi berkaitan dengan pembagian peran (*role sharing*) dalam pengelolaan DAS. Bappeda berperan dalam mengkoordinir semua SKPD dalam pembagian peran setiap SKPD terutama dalam perencanaan pengelolaan DAS agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. Selain institusi yang ada di daerah, beberapa instansi pemerintah pusat seperti BPDAS Solo, BBWS Bengawan Solo, perusahaan pemerintah (Perum Perhutani, PLN, PDAM) dan lembaga swadaya masyarakat, juga berperan dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu.

DAS Bengawan Solo Hulu telah memiliki *Grand design* pengelolaan DAS yang disusun oleh BPDAS Solo. Masing-masing institusi yang terkait dengan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu dilibatkan dalam kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penganggaran dana pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu dibiayai APBN melalui (1) kegiatan BPDAS Solo yang dilaksanakan oleh Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten, (2) kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai-Bengawan Solo yang dilaksanakan oleh Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Pengairan Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten dan (3) APBD SKPD Kabupaten. Proses pengelolaan DAS mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi disajikan sebagai berikut:

(a) Perencanaan pengelolaan DAS yang merupakan Rencana Strategis (Renstra) tahunan dari setiap SKPD kabupaten yang telah disetujui dan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten. Adapun instansi terkait dalam proses perencanaan adalah : (1) Balai Pengelolaan DAS Solo, (2) Bappeda Kabupaten, (3) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten, (4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortukultura Kabupaten, (5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, (6) Dinas Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten, (7) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten, (8) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, (8) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, (9) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo , dan (10) Perum Perhutani Unit I Semarang. Pertama SKPD mengajukan rencana kegiatan ke Bappeda Kabupaten terkait pengelolaan DAS yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing kabupaten (Wonogiri dan Pacitan). Setelah dikoreksi dan dikonsultasikan ke Bappeda, kemudian diperbaiki oleh SKPD. Kepala SKPD memaparkan seluruh biaya kegiatan pada tahun berjalan di hadapan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten. Setelah direvisi dan disetujui

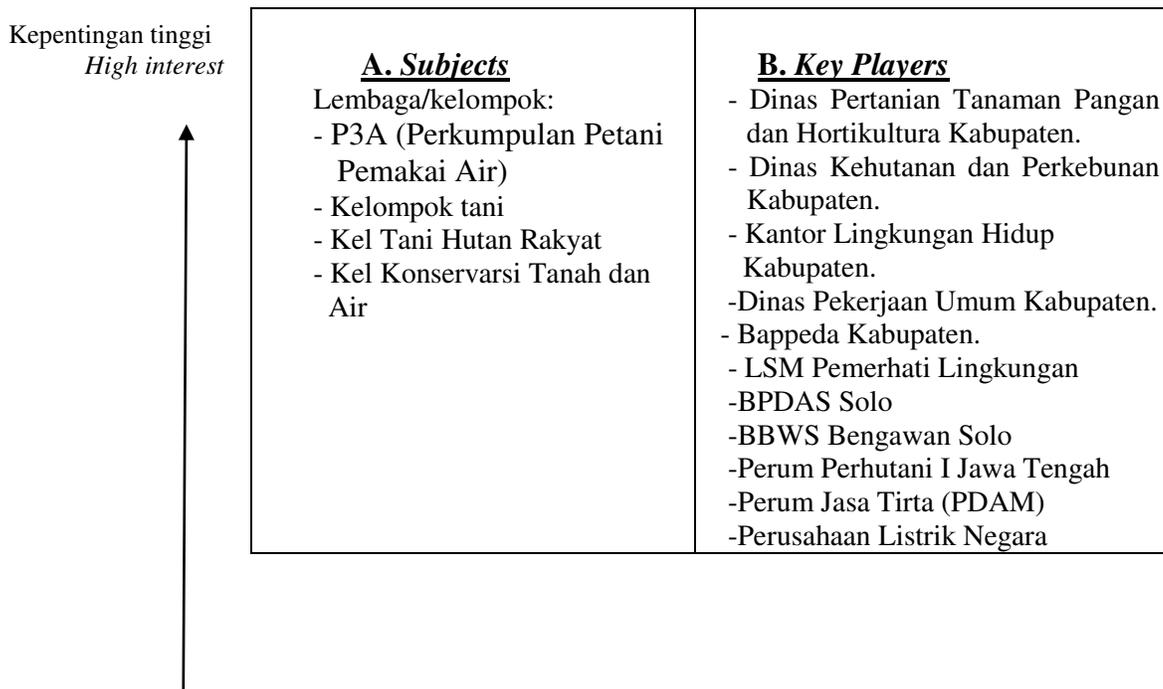
DPRD Kabupaten, selanjutnya rencana kegiatan tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Agar tidak terjadi campur-aduk (*over lapping*) maka dibentuklah Forum SKPD Kabupaten yang bertemu sebulan satu kali di ruang rapat Bappeda dengan koordinator Bappeda Kabupaten Wonogiri. Dalam proses perencanaan, dinas yang mengurus bidang kehutanan di Kabupaten Wonogiri dan Pacitan, berkonsultasi ke BPDAS Solo dan mengacu pada *grand design* yang disusun BPDAS Solo.

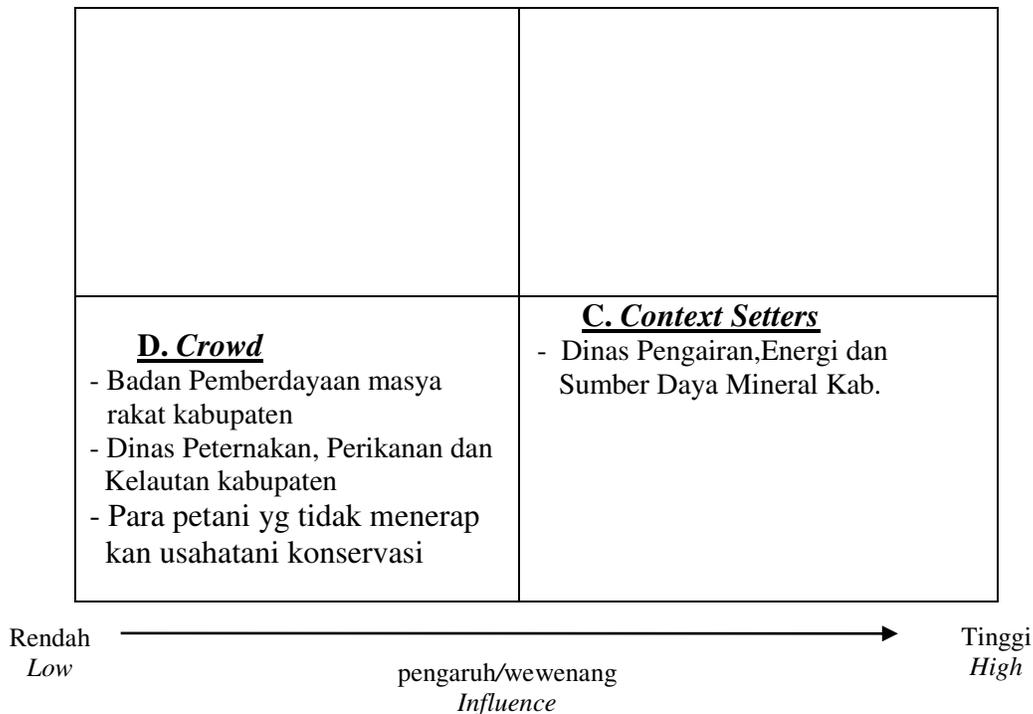
- (b) Institusi yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan DAS Bengawan Solo hulu, yaitu: (1) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten, (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten (4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, (5) Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten, (6) Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten, (7) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, dan (8) LSM. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS mengacu pada rencana yang telah disusun bersama dan setiap instansi melakukan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya. Tidak setiap instansi yang merencanakan kegiatan juga melaksanakannya, terutama instansi pemerintah pusat. Sebagai gambaran, BPDAS Solo merencanakan penanaman sejuta pohon di Sub DAS Wuryantoro, yang melaksanakan penanaman Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri; sementara pada bidang pengairan untuk membangun saluran irigasi atau bendungan, yang merencanakan BBWS Bengawan Solo yang melaksanakan Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten. Sehingga untuk pelaksanaan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu memerlukan sinergi dan koordinasi antar instansi.
- (c) Monitoring dan evaluasi kegiatan. Bappeda bersama SKPD yang akan dimonitor dan dievaluasi, melaksanakan kegiatan monitoring-evaluasi. Hasilnya dilaporkan ke bupati. Apabila kegiatan melibatkan banyak instansi maka semua masukan diterima dan akan dipelajari relevansinya sesuai dengan Renstra-nya. Kendala yang dihadapi adalah dalam menentukan waktu untuk bersama-sama memonitor dan mengevaluasi kegiatan di setiap SKPD terkait pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. Implikasinya SKPD melakukan monitoring-evaluasi kegiatannya sendiri yang dilaksanakan oleh seksi evaluasi bersama kepala SKPD nya, tidak melibatkan Bappeda. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada kuartal, tengah tahun dan akhir tahun. Sehingga pelaksanaan kegiatannya tepat sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Institusi yang terlibat dalam monitoring evaluasi

kegiatan pengelolaan DAS antara lain (1) Bappeda Kabupaten, (2) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten, (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, (4) Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, (5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten (6) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, (7) Dinas Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten, (8) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, (9) Balai Pengelolaan DAS Solo, (10) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, (11) Perum Perhutani Unit I Semarang, dan (12) LSM. Instansi yang bertanggung jawab dalam evaluasi kegiatan adalah instansi yang melaksanakan kegiatan tersebut.

B. Analisis Parapihak

Peran parapihak (Bryson,2003) diklasifikasikan dengan pendekatan *interest* (kepentingan) yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. *Influence* (pengaruh/wewenang) merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari SKPD/insitusi/lembaga sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. Parapihak memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. Peran parapihak sesuai dengan tingkat kepentingan dan wewenangnya/pengaruhnya dalam pengelolaan DAS disajikan pada Gambar 3.





Sumber: Analisis data, 2011
 Source: Data analysis, 2011

Gambar 3. Matriks Analisis Parapihak Kelembagaan Pengelolaan DAS
 Figure 3. Matrix Analysis of Watershed Management of Institutional Parties

Hasil penempatan parapihak pada matriks di atas adalah sebagai berikut :

1. *Key Players.*

Parapihak yang terkait sebagai *Key Player* adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan dan LSM pemerhati lingkungan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mairi, *et al.* (2010) yang menunjukkan bahwa di era otonomi daerah peran Dinas Kehutanan Kabupaten semakin berperan dalam pengelolaan DAS.

Para pihak yang berperan sebagai *Player* merupakan potensi besar dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo hulu. Para pihak ini harus dilibatkan secara penuh dalam setiap proses dan mendorong pengelolaan DAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatahillah (2013) yang menemukan bahwa parapihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi di DAS Garang adalah BBWS Pemali Jratun, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, BPDAS Pemali Jratun, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan LSM Bintari.

2. *Context Setters.*

Para pihak yang terkait sebagai *Context Setters* adalah Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Manusia Kabupaten. Instansi ini berpengaruh dalam mengubah kebijakan dan keadaan DAS Bengawan Solo hulu, dengan memberikan izin tambang galian C ke pihak ketiga. Sehingga kegiatan yang dilakukan kadang ada konflik kepentingan dengan upaya pelestarian DAS.

3. *Subjects.*

Para pihak yang terkait sebagai *Subjects* adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kondisi saat ini menunjukkan bahwa P3A belum mampu sepenuhnya mengelola jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kemampuan pembiayaan dan kelembagaannya (Balitbang Kimpraswil, 2004) Kelompok Tani, Kelompok Tani Hutan Rakyat, dan Kelompok Konservasi Tanah Air. Institusi ini tumbuh berkembang bersama masyarakat sehingga lembaga-lembaga ini yang akan langsung merasakan akibat dari kegiatan pengelolaan DAS khususnya berkaitan dengan produktivitas lahan dan ketersediaan air. Penelitian Mairi *et al.* (2010) menemukan bahwa lembaga-lembaga ini tidak berhak mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan terkait dengan pengelolaan DAS namun hanya sebatas memberikan arahan-arahan dan saran. Lembaga-lembaga ini perlu diberi informasi yang cukup dan tepat tentang pengelolaan DAS, karena mereka akan berguna bagi proses penyusunan perencanaan sampai pelaksanaan.

4. *Crowd.*

Para pihak yang terkait sebagai *Crowd* adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, para petani yang belum menerapkan usahatani berbasis konservasi tanah dan air dalam mengelola lahannya. Institusi-institusi ini berpandangan bahwa pengelolaan DAS belum menjadi tujuan utama dalam mendukung pengembangan kegiatannya sehingga pengelolaan DAS kurang diperhatikan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kabupaten sampai saat ini juga belum fokus meneliti terkait pengelolaan DAS. Kondisi ini dikarenakan kurangnya peneliti yang berlatar belakang pengelolaan DAS.

Disamping itu, terdapat faktor sosial yang berpengaruh dalam pengelolaan DAS antara lain kepadatan penduduk, tingkah laku konservasi, hukum adat, nilai tradisional, kelembagaan dan budaya kerja sama atau gotong royong. Budaya bekerja sama antar organisasi dan instansi dalam memajukan pembangunan dan pengelolaan DAS Bengawan Solo hulu. Temuan ini

sejalan dengan hasil penelitian Martin dan Winarno (2010) dimana kerja sama menjadi pengikat para pihak dalam pemanfaatan dan usaha bersama di lahan usahatani.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Para pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh besar dalam pengelolaan DAS, yaitu: Bappeda, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan. Instansi tersebut terkait langsung dengan pengelolaan DAS yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Wonogiri. Besarnya kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu setiap institusi tergantung pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada institusi tersebut. Koordinasi sangat diperlukan antar instansi/lembaga terkait pengelolaan DAS, sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*over lapping*) lokasi maupun kegiatannya. Untuk itu komunikasi intensif dan terbuka diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Bappeda Kabupaten Wonogiri merupakan koordinator Dinas/lembaga/kantor di kabupaten Wonogiri yang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) wilayah hulu atau wilayah kabupaten dominan. Instansi pemerintah pusat seperti BBWS - BS , Perum Perhutani Jawa Tengah dan Balai Pengelolaan DAS Solo dibutuhkan keberadaan dan kegiatannya di Kabupaten Wonogiri karena dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mendorong peran institusi dalam pengelolaan DAS

B. Saran

Instutusi yang berperan sebagai Key Players perlu didorong agar berperan penuh atau tingkat partisipasinya lebih ditingkatkan dan dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. Tugas pokok dan fungsi para pengambil kebijakan dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu harus mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan DAS. Koordinasi sangat diperlukan agar tidak terjadi campur-aduk dan duplikasi untuk tercapainya tujuan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPTKPDAS) Surakarta dan BAPPEDA beserta Dinas/lembaga/institusi yang terkait pengelolaan DAS di Kabupaten Wonogiri atas fasilitas dan data yang penulis jadikan bahan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviya, I., Salminah, M., Arifanti, V.B., Maryani, R dan Syahadat, E. (2012). Persepsi para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lanskap hutan di daerah aliran sungai Tulang Bawang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(4), 171-184.
- Balitbang Kimpraswil Puskim. 2004. *Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A)*. Jakarta: Pusat Kajian SBEW.
- Blackstock, K.L., Waylen, K.A., Dunglinson, J., Marshall, K.M. (2012). Linking process to outcomes-internal and external criteria for a stakeholder involvement in river basin management planning. *Ecological Economics*, 77, 113—122.
- Brinkerhoff, D.W and Crosby, L. (2002). *Managing policy reform: Concepts and tool for decision makers in developing countries and transition countries*. USA: Kumarian Press Inc.
- Bryson, J.M. (2003). What to do when stakeholder matter: A guide to stakeholder identification and analysis techniques. *Paper presented at the London School of Economics and Political Science*. London: London School of Economics and Political Science.
- Colfer, C.J.P., Prabu, R., Gronter, M., McDougall, C., Porro, M.M, & Porro, M. (1999). *Siapa yang perlu dipertimbangkan. Menilai kesejahteraan manusia dalam pengelolaan hutan lestari* (terjemahan). Bogor: SMK Grafika Mardi Yuana.
- Fatahillah, M. (2013). *Kajian keterpaduan lembaga dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Garang Provinsi Jawa Tengah*. (Skripsi). Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Instruksi Menteri Kehutanan No: INS.3/Menhut-II/2009 tentang luas DAS/Sub DAS Wilayah SWP DAS Solo.
- Grimble, R. (1998). *Stakeholder methodologies in natural resource management. Socio-economic methodologies, best practice guidelines*. Chatham. UK.
- Mairi, K., Iwanuddin, Hidayah, H.N., Karundeng, M.C dan Jafaruddin. (2010). *Sistem kelembagaan pengelolaan DAS hulu (dalam Kabupaten)*. (Laporan Hasil Penelitian). Manado: Balai Kehutanan Manado.
- Martin, E & Winarno, B. (2010). Peran para pihak dalam pemanfaatan lahan gambut: Studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(2), 81-95.
- Meinzen-Dick, R., DiGregorio, M., & McCarthy, N. (2004). Methods for studying collective action in rural development. *Agricultural Systems*, 82(3), 197-214.

- Mitroff, I dan Linstone, H. (1993). *The unbounded mind*. New York: Oxford University Press.
- Paimin, Sukresno, dan Purwanto. (2006). *Sidik cepat degradasi Sub DAS*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.
- Puspitojati, T., Darusman, D., Tarumingkeng, R.C., & Purnama, B. (2012). Pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi: Studi kasus di kesatuan pemangkuan hutan Bogor. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(3), 190-201.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., ... , & Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 2009(90): 1933-1949.
- Rosalina. (2010). *Dua puluh dua DAS Kritis di Indonesia*. Diunduh 20 Maret 2014 dari <http://www.tempo.co/read/news/2010/10/19/173285772/22-DAS-di-Indonesia-dalam-Kedaaan-Kritis>.
- Tarlock, A.D. 2003. *The potential role of local goverments in watershed management*. *Pace environmental law review*. Paper 455. <http://digitalcommons.pace.edu/envlaw/455>.

Lampiran 1. Peran institusi pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu

Appendix 1. The roles institutions to Bengawan Solo watershed

No.	Nama SKPD	Tupoksi	Peran lembaga dalam pengelolaan DAS
1	Bappeda	Menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah.	a. Menyusun rencana tata ruang dan tata wilayah b. Koordinator perencanaan kegiatan instansi terkait pengelolaan DAS c. Pelaksana Monev pengelolaan DAS
2	BPDAS (Balai Pengelolaan DAS) Solo	Menyusun rencana, penyajian informasi, pengembangan model kelembagaan dan kemitraan serta pemantauan evaluasi daerah aliran sungai.	a. Menyusun rencana pengelolaan DAS b. Mengembangkan kelembagaan DAS c. Evaluasi DAS
3	BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Solo	Melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai bengawan solo.	a. Menyusun rencana pengelolaan sumber daya air yang merupakan bagian dari DAS b. Monitoring pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang merupakan bagian dari DAS
4	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan	Pelaksana dan evaluasi monitoring pengelolaan DAS bidang tanaman pangan dan hortikultura
5.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan	Pelaksana dan evaluasi monitoring pengelolaan DAS bidang kehutanan dan perkebunan
6	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan.	Pelaksana dan evaluasi monitoring pengelolaan DAS bidang lingkungan hidup
7	Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan.	Pelaksana dan evaluasi monitoring pengelolaan DAS bidang pengairan
8	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta tugas pembantuan.	Perencana Pelaksana dan evaluasi monitoring pengelolaan DAS bidang pekerjaan umum
9	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan perikanan dan kelautan serta tugas pembantuan.	Perencana Pelaksana dan evaluasi monitoring pengelolaan DAS bidang peternakan.
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan.	Perencana dan evaluasi monitoring pengelolaan DAS bidang pemberdayaan masyarakat
11	Perum Perhutani I	Pengelolaan hutan di pulau Jawa yang	Perencana dan evaluasi

No.	Nama SKPD	Tupoksi	Peran lembaga dalam pengelolaan DAS
		terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung.	monitoring pengelolaan DAS bidang kehutanan dan masyarakat secara tidak langsung.
12	Libangda Kabupaten	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tugas pembantuan.	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS
13	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan tugas pembantuan.	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS
14	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan.	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga serta tugas pembantuan.	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS
16	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan.	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS
17	Kantor Staf Ahli Bupati	Memberikan telaahan permasalahan pemerintah daerah bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sdm dan ekonomi dan keuangan dan sebagai penghubung dengan SEKDA.	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS
18	PDAM Kabupaten	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang air bersih dan tugas pembantuan.	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS
19	Perusahaan Listrik Negara di Kabupaten	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang listrik dan tugas pembantuan.	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS
20	Lembaga swadaya masyarakat	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemerhati lingkungan dan tugas pendampingan kelompok konservasi tanah dan air di kabupaten	Tidak terkait langsung dengan pengelolaan DAS